

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Stewardship*

Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*). Teori *Stewardship* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis, mengemukakan bahwa manajer eksekutif ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pelayan yang baik bagi perusahaan. Teori ini menyatakan tidak ada motivasi untuk kepentingan manajer eksekutif, sehingga manajer eksekutif jauh dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik seperti yang dicita-citakan. Para manajer eksekutif tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada kepentingan perusahaan. Manfaat dengan adanya peran manajer eksekutif adalah kesatuan arah dan komando yang kuat dan terkontrol. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah teori *Stewardship* tidak berfokus pada tujuan individu melainkan menjadi fasilitator dalam pemberdayaan untuk perusahaan. Penggabungan jabatan antara manajer eksekutif dengan manajer dan anggota dewan perusahaan akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam kepentingan perusahaan.³³

Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah, sebab instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba namun lebih cenderung kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai prinsipnya.

³³ Donaldson, Lex dan James H, Davis. “*Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*”. *Australian Journal of Management*. 2011, Vol. 16. No. 1, hlm 9

Instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Perangkat desa yang memiliki tugas yang bertanggungjawab terhadap masyarakat desa. Salah satu tugas dan wewenang perangkat pemerintah desa yaitu mengelola dana desa. Perangkat pemerintah desa yang mengelola dana desa harus perangkat yang kompeten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Teori *Stewardship* oleh Donaldson et al (1991) menjelaskan faktor-faktor akuntabilitas pengelolaan meliputi faktor psikologi dan faktor situasional. Faktor psikologi adalah suatu penyederhanaan mengenai tingkah laku manusia atas suatu argumentasi, selain itu manusia mempunyai kebutuhan untuk berkembang sesuai kebutuhan melebihi dari keadaan sekarang dan akan mencapai level yang paling tinggi dengan sukses dan diasumsikan secara ekonomi manusia dipandang sebagai orang yang dibatasi oleh kemampuan untuk mencapai potensial.

Stewardship Theory menjadi dasar penelitian ini dalam menentukan variabel peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat pengelola dana desa mengesampingkan kepentingan individunya dan lebih mengutamakan menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa, sebab yang diinginkan dari perangkat pemerintah desa adalah hasil terbaik untuk tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa. Perangkat desa dalam mengelola dana desa kemungkinan bekerja orientasinya adalah untuk kesejahteraan desa. Perangkat desa sudah

selayaknya harus mengelola dana desa dengan baik digunakan sebagaimana mestinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah harus diawasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatkan pertanggungjawaban pengelola, informasi yang diterima oleh masyarakat akan menjadi lebih berimbang. Organisasi pada paham kolektif erat kaitannya dengan faktor partisipasi masyarakat yang menekankan pada tujuan kelompok.

Fasilitas yang layak perlu dicapai dan pekerjaan perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan *feedback*. Semua faktor ini berhubungan menambah kesempatan untuk berkembang dan bertanggungjawab dari pekerjaan. Keahlian yang dimaksud dalam faktor motivasi erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

B. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo³⁴ Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial untuk mencari laba, sedangkan sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba) karena sumber daya dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Sektor publik akuntansi diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik.³⁵

1. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.³⁶ Sedangkan Mardiasmo mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat

³⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Publisher (Andi Offset), 2018), Hlm 36

³⁵ Anik Yuesti, dkk., *Akuntansi Sektor Publik*, (Bandung : CV Noah Aletheia, 2020), hlm 16

³⁶ Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Erlangg, 2010), Hlm 70

informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.³⁷

Dari definisi-definisi di atas akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (*government*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.³⁸

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan

³⁷ Ibid., *Akuntansi Sektor Publik*, hlm 88

³⁸ David Pangaribuan, *Modul Akuntansi Sektor Publik*, (Bintaro: Universitas Bangunan Jaya, 2018), hlm. 3

efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).³⁹

Bidang akuntansi sektor publik di Indonesia:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Beribadah
5. Akuntansi LSM
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan
8. Akuntansi Kesehatan⁴⁰

C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Akuntabilitas

1.1. Pengertian Akuntabilitas

Halim dan Iqbal menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja, tindakan dan atau keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang

³⁹ Anik Yuesti, dkk, *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*, (Denpasar: CV Noah Aleitheia, 2020), hlm. 4-5

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 15

memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut.⁴¹ Sedangkan, Fajri menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjelaskan mengenai kinerja, tindakan dan keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut.⁴²

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban mengenai tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi dalam hal ini adalah pemerintah, kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah masyarakat.

1.2. Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo menyatakan bahwa terdapat 2 jenis akuntabilitas yaitu:

- a) Akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota.
- b) Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya

⁴¹ Halim A. dan M. Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Tiga*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012), hlm. 43

⁴² Tasya Thin Nuzula, Skripsi: *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)*, (Cimahi: Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020), hlm. 16

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴³

1.3. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Aspek-aspek akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas mempunyai arti sebagai sebuah hubungan. Akuntabilitas merupakan komunikasi dua arah seperti yang sudah dijelaskan oleh *Auditor General of British Columbia*, yaitu sebuah kontrak yang terjadi antara 2 pihak.
- b) Akuntabilitas mengarah atau berorientasi atas hasil. Pada struktur atau susunan organisasi sektor publik dan swasta saat ini, akuntabilitas tidak memandang kepada input ataupun output, melainkan kepada outcome.
- c) Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
- d) Akuntabilitas itu tidak ada arti dan nilainya tanpa adanya konsekuensi. Kata kunci utama yang digunakan didalam mendefinisikan dan mendiskusikan akuntabilitas adalah tanggungjawab.
- e) Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk meningkatkan atau memajukan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: Mia-Unkris, 2011), hlm 27-28

2. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁵

Dana Desa di salurkan dari APBN melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, kemudian Pemerintah Daerah menyalurkan dana tersebut ke Rekening Kas Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 99 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Berikut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa :

- a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 3 bulan Juni sebesar 20%
- b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 4 bulan Juni sebesar 40%
- c. Tahap III, paling cepat disalurkan pada bulan Juli sebesar 40%

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas.⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 100 menyatakan

⁴⁵ Ibid., *Buku Pintar Dana Desa*, hlm. 20.

⁴⁶ Ibid., hlm. 21

bahwa terdapat persyaratan dalam penyaluran Dana Desa disetiap tahapnya yaitu sebagai berikut :

a. Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap I yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan, bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD tahun anggaran berjalan
- 2) Peraturan Bupati atau Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa

b. Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap II yaitu :

- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa anggaran sebelumnya
- 2) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap III yaitu :

- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai tahap II
- 2) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sampai dengan tahap II.⁴⁷

Laporan realisasi penyaluran harus menunjukkan paling sedikit 75% dari Dana Desa yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota dan menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :

⁴⁷ Ibid., *Penyaluran Dana Desa*, hlm. 22

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa

Jika Bupati atau Walikota tidak menyampaikan persyaratan tersebut sampai dengan tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara, Sisa dana ini nantinya tidak ditransfer kembali pada tahun berikutnya.⁴⁸

D. Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., hlm. 24

⁴⁹ Blalock, Hubert M. Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 7

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa.⁵⁰

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu:

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian dan ketetapan pembagian waktu kerja.
5. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
6. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Sumber daya manusia yang diinginkan dalam perangkat desa adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor tersebut. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa.

⁵⁰ Neny Tri Indrianasari, "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak STIE Widya Gama Lumajang*, Vol. 1 No. 2, 2017, Hlm. 33

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

- a. Memimpin pemerintahan desa.
- b. Mengkoordinasikan pembangunan desa.
- c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah

digariskan. Dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya dalam Otonomi Desa. Dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.⁵¹

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (2006 : 10), antara lain :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b) Mengerjakan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

⁵¹ Siti Ulya Ani, Skripsi: *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dan Desa, (Studi Kasus pada Desa Pudaria aya Kecamatan Moramo)*, (Kendari: Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Universitas Halu Oleo, 2016), hlm. 13-17.

- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Utami dan Sofyan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.⁵²

Demi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan ataupun kritikan dalam hal penyusunan dan pembuatan kebijakan. Sedangkan Nuzula, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁵³

⁵² Utami, K. dan E. Sofyan, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, *Jurnal Wahana Riset Akuntansi, Universitas Negeri Padang Vol. 1 No. 1*, 2013), Hlm.63

⁵³ Nuzula, T.T., Skripsi: *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)*, (ju Cimahi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020), Hlm 8

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dengan tujuan pengawasan dan control agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang.

2. Tujuan Partisipasi Masyarakat

- a) Mengimplikasikan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan.
- b) Menyampaikan hak suara masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan.
- c) mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Kemudian, untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.⁵⁴

3. Peran Penting Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

- a) Partisipasi masyarakat dapat menjadi wadah untuk mendapat informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan respon masyarakat setempat perihal program pembangunan.
- b) Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan dapat membangun rasa kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola program tersebut.

⁵⁴ Henry Sanoff, *Community Participation Methods in Design and Planning*, (USA: John Willey & Sons Inc), 2020, hlm 45

- c) Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hak demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat.

4. Prinsip Dasar Pengembangan Partisipasi Masyarakat

a) Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Perlembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural, secara vertikal maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggara suatu kegiatan.

b) Tumbuh dari bawah

Partisipasi itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat *bottom*

up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hak demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat.

c) Kepercayaan dan Keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.⁵⁵

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Definisi Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi *hardware*, *software* dan *useware* untuk memperoleh, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi pada orang lain dengan waktu yang cepat dan juga tepat.⁵⁶ Sedangkan, menurut Uno dan Lamatenggo menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk

⁵⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintah Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press. 2014), hlm 10-11

⁵⁶ Murhada, & Giap, Y. C, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011), hlm 9

menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.⁵⁷

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software* dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

2. Manfaat Teknologi Informasi

Manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

- a. Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat
- b. Teknologi Informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah
- c. Teknologi Informasi dapat menjadi pengembang keterampilan yang berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Peranan Teknologi Informasi di dalam bidang Pemerintahan

Hampir disetiap perkantoran maupun dinas atau instansi pemerintah sudah menggunakan komputer. Penggunaannya umumnya untuk pelayanan masyarakat (*public service*), menyusun dan pengarsipan data penduduk,

⁵⁷ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 7

mengolah data pada administrasi tata usaha, statistika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain.⁵⁸

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi yang bias meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi dapat menciptakan hubungan bentuk yang baru misalnya : G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2G (*Government to Government*). Apalagi sekarang dengan melalui *e-government*, komputer mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan berguna bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi beragam kebijakan, mempromosikan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya, melaksanakan pemberdayaan masyarakat seperti kerjasama yang dilakukan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Sepertinya teknologi informasi dimasa yang akan datang bakal digunakan sebagai pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemelihan umum yang merupakan konsep atau rancangan yang sudah dilaksanakan di berbagai Negara maju. Selain itu masyarakat dapat menyalurkan aspirasi atau pendapat secara langsung kepada para legislative dan eksekutif pemerintah melalui sebuah e-mail atau forum elektronik pada web yang dibangun pemerintah setempat.

Manfaat *e-government* yang dapat dirasakan antara lain :

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

⁵⁸ Murhada, & Giap, Y. C., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 20

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Salah satu solusi

yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi *on-line* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintahan desa.⁵⁹ Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan

⁵⁹ Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta:Erlangga, 2015), hlm 7

masyarakatnya serta sumber daya yang dimiliki oleh desa serta baik yang bercirikan demokratis dan juga disentralistis.⁶⁰

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam dalam proses mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalagunaan wewenang. Partisipasi masyarakat berperan sebagai wadah dalam menyampaikan kritik atau saran tentang apa yang mereka butuhkan sebagai kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.⁶¹

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.⁶²

4. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan dapat mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pengelolaan dana desa masih memiliki

⁶⁰ Neny Tri Indrianasari, “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Vol. 1 No. 2*, 2017, Hlm 30

⁶¹ Andrian Tawai & Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: *Literacy Institute*, 2017), hlm. 9

⁶² Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 7

banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia yaitu tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal, Untuk itu dalam pelaksanaannya aparatur desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh masing-masing aparatur desa untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.⁶³

5. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi pemerintah desa sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas. Komitmen pada organisasi adalah salah satu dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan kekuatan kepada karyawan agar dapat bertahan dalam suatu perusahaan. Komitmen organisasi akan menciptakan rasa memiliki bagi pekerja, sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam melaksanakan dan termotivasi untuk melaporkan segala aktivitas dengan melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan peningkatan kinerja.⁶⁴

⁶³ Ricky Agung Prasetyo, dkk, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kota Pariaman)", *Jurnal Akuntansi*, Vol 13 No 1, 2018, hlm. 60

⁶⁴ Ni Made R. S., Kadek D. P., "Pengaruh Kompetensi Apart Pengelola Desa, Komitmen Organisasi Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, hlm. 548

6. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sarana untuk melindungi dan menjaga kekayaan perusahaan serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bisa dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dengan perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain semua proses pada tindakan dan kegiatan oleh seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁵ Embun Widya Sari, N. A, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal JOM Fekon Vol.4 No.1*, 2017, hlm. 571

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Umaira dan Adnan, 2019, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)". ⁶⁶	untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Subyek yang dipakai adalah seluruh perangkat desa. Menggunakan pengaruh partisipasi masyarakat sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen	dalam penelitian ini terdapat variabel peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada

⁶⁶ Siti Umaira dan Adnan, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat , Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 3, 2019*, Hlm 471-481.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, 2019, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap APDD (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)". ⁶⁷	untuk mengetahui pengaruh kompetensi APDD, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Menggunakan data primer dari aparatur pemerintah desa. Menggunakan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen.	dalam penelitian ini terdapat variabel peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.
3.	Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, 2019, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa,	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi aparat desa, pemanfaatan	Menggunakan Akuntabilitas Dana Desa sebagai variabel dependen.	dalam penelitian ini terdapat variabel peran perangkat desa dan partisipasi

⁶⁷ Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Vol. 10 No 1*, 2019, Hlm. 14-25.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Akuntabilitas Dana Desa”. ⁶⁸	PTI dan SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.		teknologi informasi dan SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.s dana desa.		masyarakat sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.
4.	Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani, 2017 “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. ⁶⁹	untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah peneltian kuantitatif.	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Menggunakan Peran Perangkat Desa sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen.	dalam penelitian ini terdapat variabel peran partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

⁶⁸ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa”, *Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 6, No. 2*, 2019), hlm. 280-344.

⁶⁹ Novindra Dwi Setiana1, Nur Laila Yuliani, Skripsi: *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Magelang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), Hlm. 205-210.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5.	Novia Syahputri Saragih, Denny Kurnia “Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang”. ⁷⁰	untuk mengetahui Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Menggunakan Perangkat Desa sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen.	dalam penelitian ini terdapat variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.
6.	Ni Putu Devi Anggreni1, Ni Komang Sumadi Rai Dwi Andayani W, 2021, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap	untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, peran perangkat desa, dan Variabel Audit	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan	Menggunakan Peran Perangkat Desa sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel	dalam penelitian ini terdapat variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya

⁷⁰ Novia Syahputri Saragih, Denny Kurnia, “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang”, *Jurnal UNSERA*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 1-9.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan) ⁷¹	Kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.		Variabel Audit Kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	dependen.	tidak ada.
7.	Periansya1, dan Sopiyan AR, 2020, “Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin” ⁷²	untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive sampling</i> . Menggunakan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas	dalam penelitian ini terdapat variabel peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.

⁷¹ Ni Putu Devi Anggreni, dkk., Skripsi : *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peranperangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)*, (Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, 2019), hlm. 5

⁷² Periansya dan Sopiyan A R, “Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.4 No.1*, 2020, hlm. 12-19.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		adalah penelitian kuantitatif.			Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen.	
8.	Sahala Purba, 2020, “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah)”. ⁷³	mengetahui pengaruh Peran perangkat desa dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.	Kuantitatif	Peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemahaman perangkat desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive samplin</i> . Menggunakan Peran Perangkat Desa sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen	dalam penelitian ini terdapat variabel pemanfaatan teknologi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.
9.	Siti Sarah, Taufeni	Untuk	Kuantitatif	terdapat pengaruh	Teknik	dalam penelitian

⁷³ Sahala Purba, “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Vol. 3 No. 1*, 2020, hlm. 10-12

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Taufik, Devi Safitri, 2020, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, PTI, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu”. ⁷⁴	mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, PTI, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap APDD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.		positif yang signifikan antara Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive sampling</i> . Menggunakan PTI sebagai variabel independen, dan menggunakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen	ini terdapat variabel peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat, sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ada.
10	Defi Rizki Awaliyah Daulay, 2021, Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi	untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,	Kuantitatif	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi aparatur,	Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive</i>	dalam penelitian ini terdapat peran perangkat desa sedangkan pada penelitian

⁷⁴ Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 4, 2020, Hlm. 330-332

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Masyarakat, PTI, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap APDD (Studi Di Desa Tambusai Timur, Suka Maju Dan Lubuk Soting) ⁷⁵	partisipasi masyarakat, PTI, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.		partisipasi masyarakat, PTI, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	<i>sampling</i> . Menggunakan Partisipasi Masyarakat dan PTI sebagai variabel independen, dan menggunakan APDD sebagai variabel dependen	sebelumnya tidak ada.

Sumber: Data penelitian diolah, 2022

⁷⁵ Defi Rizki Awaliyah Daulay, Skripsi: *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Tambusai Timur, Suka Maju dan Lubuk Soting)*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2021), hlm. 4

I. Hubungan Variabel

1. Hubungan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran perangkat desa merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintahan desa.⁷⁶ Adanya peran perangkat desa terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan sebagai pengelola dana desa mempengaruhi visi misi dalam mewujudkan tujuan organisasi dilihat dari bagaimana cara melaksanakan tugas yang telah dipercayakan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sahala Purba,⁷⁷ Peran perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Fitri⁷⁸ dalam penelitiannya menyimpulkan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maria,⁷⁹ Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok.

⁷⁶ Indra B, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 7

⁷⁷ Sahala Purba, "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Vol. 3 no. 1*, 2020), hlm. 10-19.

⁷⁸ Fitri Ayu Nandea, Skripsi: *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Des, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Demak)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019), hlm. 70.

⁷⁹ Maria Fransiska E. L., Skripsi: *Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya), hlm 71

2. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hak, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalagunaan wewenang, selain itu hal ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran atau kritik kepada Pemerintah Desa dan sebagai bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.⁸⁰ Dari penelitian yang dilakukan oleh Ani⁸¹ menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah⁸² partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyampaikan

⁸⁰ Andrian Tawai & Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: Literacy Institute, 2017), hlm. 9.

⁸¹ Siti Ulya Ani, Skripsi: *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2020), hlm. 122.

⁸² Siti Nurhidayah Nafsiah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya", *Jurnal JIBM Vol. 3, No. 2, 2020*, hlm. 104

informasi.⁸³ Dari penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti.⁸⁴ Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi⁸⁵ Koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

4. Hubungan Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dengan kinerja peran perangkat desa yang baik, hal tersebut bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat harus terlibat dalam segala program perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi karena mereka yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka pembangunan wilayahnya kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, efisiensi dalam berbagi data dan informasi, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga, dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dari

⁸³ Mukhsin, "Peran Teknologi informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi", *Jurnal TEKNOKOM Vol.3 No. 1*, 2020), hlm. 9.

⁸⁴ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 6, No. 2*, 2019), hlm. 280-344.

⁸⁵ Karyadi Muh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek)", *Jurnal Ilmiah Rinjani Vol. 7 No. 2*, 2019), hlm. 44.

penelitian yang dilakukan oleh Deni⁸⁶ pengaruh peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prita⁸⁷ peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

J. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bermakna sebagai rancangan yang digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai implikasi antara variable yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Bersumber pada kajian teori diatas dapat dijelaskan agar dapat menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka 19 Desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung diperlukan peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintah terhadap tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaporan oleh pemerintah dalam prinsip untuk kepentingan masyarakat.

⁸⁶ Deni Saputra, Skripsi : *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran”, 2020), hlm. 6

⁸⁷ Prita Dilla Anggraeni, Skripsi : *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)*, (Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hlm. 3.

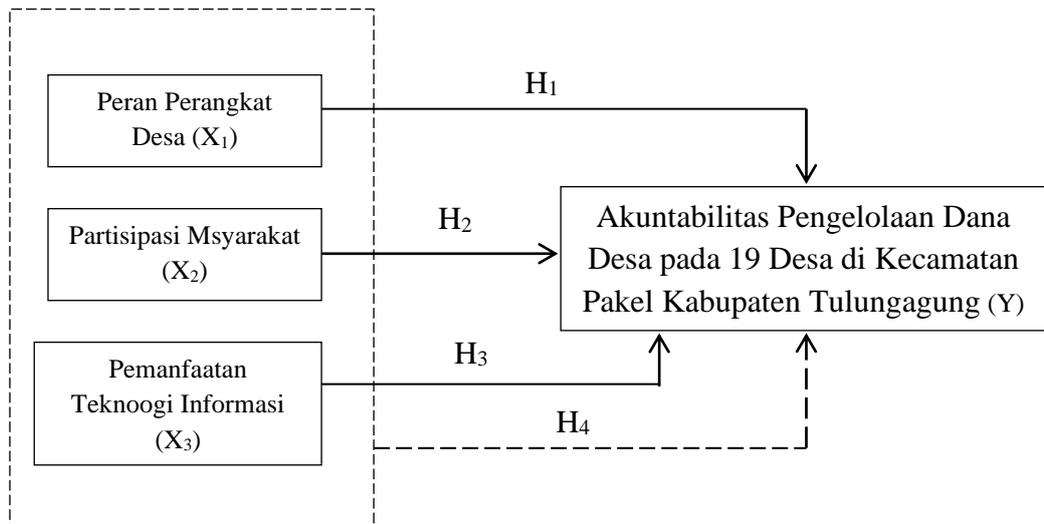
Peran perangkat desa menjadi mengesampingkan kepentingan individunya dan lebih mengutamakan menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa, sebab yang diinginkan dari perangkat pemerintah desa adalah hasil terbaik untuk tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa. Perangkat desa dalam mengelola dana desa kemungkinan bekerja orientasinya adalah untuk kesejahteraan desa. Perangkat desa sudah selayaknya harus mengelola dana desa dengan baik digunakan sebagaimana mestinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat yang menekankan pada tujuan kelompok.

Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Fasilitas yang layak perlu dicapai dan pekerjaan perlu didesain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan feedback. Semua faktor ini berhubungan menambah kesempatan untuk berkembang dan bertanggungjawab dari pekerjaan. Keahlian yang dimaksud yaitu sumber daya yang dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, kerangka konseptual disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Dari kerangka konseptual diatas terdiri dari tiga variabel bebas yaitu, peran perangkat desa (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3). Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung (Y).

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dimana pada rumusan masalah yang digunakan yaitu kalimat tanya. Hipotesis dapat dikatakan jawaban sementara karena belum ada jawaban yang berdasarkan fakta, jadi hipotesis merupakan jawaban teoritis

yang didasarkan atas rumusan masalah.⁸⁸ Berdasarkan teori atas rumusan masalah, maka hipotesis yang diuji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Diduga peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
 H_1 : Diduga peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
2. H_0 : Diduga partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
 H_2 : Diduga partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
3. H_0 : Diduga pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
 H_3 : Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
4. H_0 : Diduga peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 64.

akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

H₄ : Diduga peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa di 19 Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

L. Mapping Variabel dan Operasional

Tabel 2.2
Mapping Variabel dan Operasional

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1	Peran Perangkat Desa	Sekumpulan tugas dan kewajiban oleh aparatur desa berada dibawah naungan kepala desa yang diharapkan dapat dilaksanakan	1. Keterlibatan proses perencanaan dana desa 2. Keikutsertaan proses pengelolaan dana desa 3. Keterlibatan proses pelaksanaan penggunaan anggaran 4. Keterlibatan proses penatausahaan, penggunaan dana desa 5. Ikut serta melakukan audit partisipatif	Skala Likert	Sri Mulyani Indrawati, <i>Buku Pintar Dana Desa</i> , (Jakarta: 2017)
2	Partisipasi Masyarakat	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada dalam lingkungan	1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program – program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran, 3. Terlibat dalam rapat	Skala Likert	Sri Mulyani Indrawati, <i>Buku Pintar Dana Desa</i> ,

		masyarakat	paripurna, 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan.		(Jakarta: 2017)
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penggunaan teknologi oleh pemerintahan sebagai pengolahan data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu	1. Ketersediaan perangkat komputer yang memadai 2. Ketersediaan perangkat lunak (<i>software</i>) untuk mengelola dana desa 3. Ketersediaan jaringan internet 4. Dimanfaatkan sesuai ketentuan atau proses terkomputerisasi	Skala Likert	Sri Mulyani Indrawati, <i>Buku Pintar Dana Desa</i> , (Jakarta: 2017)
4	Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.	1. Kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana desa kepada masyarakat 2. Pelaporan realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan PP No 60 Tahun 20014 3. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan tepat waktu 4. Laporan realisasi dana desa yang diberikan telah sesuai dengan realsasinya	Skala Likert	Sri Mulyani Indrawati, <i>Buku Pintar Dana Desa</i> , (Jakarta: 2017)

Sumber: Data diolah peneliti, 2022